

# POTRET POLITIK GENDER DI NTB: KEGAGALAN CALEG *INCUMBENT* DPRD PROVINSI PADA PEMILU 2019

Ibnu Murtadho  
Hairurrayyan

ibnumurtadho@uinmataram.ac.id  
180603032.mhs@uinmataram.ac.id  
Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstract

*The writing of this paper aims to find out the problem of women's political representation in the Provincial DPRD of NTB in 2019. To examine the results of this study, social theory was used to answer how the factors that caused the fail incumbent of the female legislative candidates provincial DPRD in general election 2019 structurally and culturally. This study uses a behavioral approach, with two data sources, primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from observations, interviews with the people concerned in the research according to the research focus, and documentation. There are three informants in this study who are incumbent of the female legislative candidates who failed to occupy the 2019 Provincial DPRD seats from the PKB party Hj. Nurlaela, the Democratic party Hj. Misfalah, and the Nasdem party Hj. Suryahartin. The results of this study indicate that the fail incumbent of the female legislative candidates provincial DPRD in general election 2019 is caused by three factors including: system constraints faced by Hj. Suryahartin, socio-cultural problems faced by H. Nurlaela, and economics or psychology faced by Hj. Misfalah points out that political system constraints are an obstacle to female legislative candidates who fail to occupy seats as members of the Provincial People's Legislative Assembly. This is influenced by several factors, both external and internal.*

**Key word: Gender, Incumbent, Female Legislative Candidate**

---

## A. Pendahuluan

Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi persoalan apabila tidak menciptakan ketidakadilan gender. Hanya saja pada praktiknya perbedaan gender pasti menjadi sebab ketidakadilan, baik dari golongan laki-laki dan terutama dari golongan perempuan.<sup>1</sup> Ketidakadilan gender Nampak dalam beberapa aspek, antara lain: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi,

---

<sup>1</sup> Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 12.



subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih besar dan sosialisasi nilai peran gender.<sup>2</sup>

Subordinasi perempuan di ranah politik menjadi salah satu perhatian aktifis gender, sebab dengan adanya representasi perempuan dalam politik maka kepentingan perempuan setidaknya bisa didengar serta diperjuangkan. Maskulinitas politik menjadi salah satu penghalang serius mewujudkan politik ramah perempuan, bukan hanya stigma dan doktrin yang sudah melekat bahwa politik sangat bersifat laki-laki serta sangat identik dengan sifat laki-laki sehingga politik bisa berjalan dengan baik jika politisi berasal dari kaum laki-laki.<sup>3</sup> Sebenarnya secara hukum Indonesia memberikan hak perempuan untuk bebas berpolitik, bahkan dijamin hak tersebut.<sup>4</sup> Salah satu tindakan yang diberlakukan untuk mengakomodir hak perempuan untuk berpolitik adalah *affirmative action* sebesar 30%, hanya saja tidak bisa dipungkiri realisasi di lapangan hanya sekadar formalitas belaka.<sup>5</sup>

Peran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif akan menjadi syarat terciptanya politik yang ramah dan sensitif terhadap kepentingan perempuan. Keterikatan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelamin menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan guna memengaruhi kebijakan.<sup>6</sup> Terkadang kehadiran perempuan di tingkat legislasi pun serasa tidak menyuarakan aspirasi perempuan itu sendiri, ini tidak lain karena faktor lingkungan tumbuh kembang yang memengaruhi pola pikir perempuan

---

<sup>2</sup> Ibid, 12-13.

<sup>3</sup> Bella Aprilia, Florencia Maria Surya, Mentari Svorna Pertiwi, "Analisis Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminis dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan Covid- 19 di Jerman, Selandia Baru dan Taiwan, Jurnal Unpar, Volume 2 (September-2020) ,92-93.

<sup>4</sup> Anifatul Kiftiyah, " Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia",Jurnal Yuridis, Volume 6, No. 2. (Desember, 2019), 57.

<sup>5</sup> Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni 2018), 81.

<sup>6</sup> Manek, Emiliana, "Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik Praktis Perempuan Belu di Kabupaten Belu", Program pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Vol. 20, No. 2, (2015) 118-120.

tersebut. Kehadiran perempuan sebagai legislator dianggap sebagai representasi politik perempuan yang coba membawa ide kaumnya, nyatanya tidak seperti yang diharap oleh beberapa aktivis feminisme itu sendiri.

Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi dengan keterwakilan perempuan terendah di Indonesia, dengan prosentase perwakilan hanya 1,54% pada tahun 2019<sup>7</sup> atau berdasarkan hasil perolehan suara calon legislatif perempuan pada pemilu 2019. Pada Tahun 2014-2019 perwakilan jumlah perempuan sebagai anggota berjumlah 6 orang: Hj Baiq Isvie Rupaeda fraksi Golkar, Hj Wartiah fraksi PPP, Hj Nurlaela fraksi PKB, Hj Rahmah fraksi Hanura, Hj. Misfalah fraksi Demokrat dan Hj Suryahartin fraksi Nasdem.<sup>8</sup> Sedangkan pileg 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari daftar calon tetap (DCT) sebanyak 914 orang, 563 diantaranya laki-laki dan 351 perempuan atau sebanyak 38,40%.<sup>9</sup> Hasil pileg 2019 cukup mengejutkan, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH dari Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi satu-satunya perempuan yang berhasil terpilih menjadi legislator di DPRD Provinsi NTB. Total pesaing yang merebutkan kursi sebanyak 351 orang, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH terpilih di daerah pemilihan (Dapil) NTB 3 wilayah Lombok Timur A (Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, wanasaba, Sembalun, Suwela, dan Labuan Haji), dengan total perolehan suara 18.634.<sup>10</sup>

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB disebabkan stigma masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki, sistem dan struktur sosial patriarki dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak

---

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>. Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 07.49.

<sup>8</sup> Chusna, Fitria, Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 diPrediksi Paling Tinggi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024>, (diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 14.30)

<sup>9</sup> Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019, Dalam <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>, diakses 5 November 2022, pukul 10.00.

<sup>10</sup> Yan Isvie Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD NTB, <https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>, diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 09.44.

sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan,<sup>11</sup> serta faktor logistik calon legislatif perempuan sebagai modal utama maju dalam kontestasi masihlah belum mencukupi kebutuhan biaya politik.<sup>12</sup>

Sebanyak 352 caleg perempuan maju dalam kontestasi DPRD Provinsi NTB di tahun 2019, hasilnya 3 orang caleg perempuan *incumbent* gagal mengulangi kejayaan pada tahun 2014-2019 sebagai anggota terpilih DPRD Provinsi NTB. Tentu hasil ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, logikanya mereka yang berstatus *incumbent* tentu sudah paham medan, memilik masa, pengalaman teknis mumpuni, penggunaan taktik efektif dan pemetaan sumber suara guna kembali duduk di kursi DPRD Provinsi periode 2019-2024. Maka penelitian ini ingin membahas apa faktor kegagalan caleg *incumbent* DPRD Provinsi NTB pada pemilu 2019?

## **B. Metodologi (size:12, bold)**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan data lapangan (*field research*).<sup>13</sup> Pemilihan penelitian kualitatif dikarenakan “masalah” yang dibawa peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis, bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang seiring selesainya penelitian di lapangan.<sup>14</sup> Adapun penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari sumber informasi dan mengamati secara langsung fenomena kegagalan *incumbent* calon legislatif perempuan DPRD Provinsi NTB di tahun 2019. Narasumber atau informan penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Winengan, “Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung”, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 22, No. 1, (Juli 2018). 63-65.

<sup>12</sup> Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, Malang: Intrans Publishing, 2018, 154.

<sup>13</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan. Selengkapnya lihat Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2013, 21.

caleg *incumbent* perempuan yang gagal kembali duduk di DPRD Provinsi NTB pada pemilu 2019, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan behavioristik yang coba menggambarkan secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisa tingkah laku manusia. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Adapun teknik triangulasi sumber melalui triangulasi teori dan triangulasi data<sup>16</sup> digunakan agar informasi yang didapat valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Teori modal sosial dipakai sebagai pisau analisis membaca hasil temuan di lapangan, teori ini dipakai sebab berakar pada gagasan kepercayaan, norma dan jaringan informal.<sup>17</sup> Kerangka inti dari teori modal sosial yaitu: kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan (*network*),<sup>18</sup> dimana kerangka ini tepat menganalisa faktor-faktor kegagalan caleg perempuan *incumbent* DPRD Provinsi NTB di pemilu 2019.

### C. Pembahasan

Sebelum memasuki pembahasan terkait kegagalan caleg *incumbent* perempuan di DPRD provinsi NTB pada pemilu 2019, terlebih dahulu akan dipaparkan rekapitulasi prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan umum 2019.

No	partai	Jumlah Dapil	L	P	L+P	Persentase Perempuan
1	PKB	8	40	23	63	36.51
2	GERINDRA	8	41	24	65	36.92
3	PDI-P	8	38	26	64	40.63
4	GOLKAR	8	40	25	65	38.46
5	NASDEM	8	38	22	60	36.67
6	GARUDA	8	28	17	45	37.78
7	BERKARYA	8	41	24	65	36.92
8	PKS	8	38	25	63	39.68
9	PERINDO	8	37	20	57	35.09

<sup>14</sup> Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 200.

<sup>15</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2012, 91-95

<sup>16</sup> Ibid, 274.

<sup>17</sup> Dwiningrum, Siti Irene Astuti, Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik, Yogyakarta: UNY Press, 2014, 1.

<sup>18</sup> Syahra, Rusydi, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5, No. 1, 2003, 4-6.

10	PPP	8	39	26	65	40.00
11	PSI	6	5	7	12	58.33
12	PAN	8	38	21	59	35.59
13	HANURA	8	41	24	65	36.92
14	DEMOKRAT	8	37	27	64	42.19
19	PBB	8	40	22	62	35.48
20	PKPI	6	22	18	40	45.00

Dari paparan data di atas unsur *affirmative action* sebesar 30% sudah terpenuhi oleh partai yang mengirim kadernya berkontestasi pada pemilu 2019 sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi NTB, akan tetapi hasilnya hanya 1 orang saja caleg perempuan yang berhasil duduk di kursi anggota DPRD Provinsi NTB.

Temuan di lapangan berdasar wawancara dengan caleg *incumbent* perempuan banyak meguak beberapa faktor kegagalan mereka untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024, maka dalam pembahasan ini akan ditampilkan hasil wawancara dengan Hj. Misfalah (caleg *incumbent* Partai Demokrat), Hj. Suryahartin (caleg *incumbent* Partai Nasdem) dan Hj. Nurlaela (caleg *incumbent* Partai PKB).

Hj. Misfalah menganggap ada beberapa faktor kekalahannya: Pertama, persaingan caleg perempuan dirasa berat menghadapi caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi anggota dewan. Kedua, dari segi akal maupun fisik perempuan kalah tangguh apabila dibandingkan dengan laki-laki karena keterbatasan ruang. Ketiga, kekalahan perempuan dari aspek materi. Tiga faktor ini dianggap sebagai pelemah *branding* politik perempuan di mata masyarakat sehingga aturan (norma) dari setiap pasangan calon anggota legislatif perempuan akan sulit dibangun karena bias terhadap pemilih yang lebih suka mencoblos caleg laki-laki karena pembatasan ruang gerak perempuan dalam mengembangkan diri di masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan tentang Undang-Undang yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan harus diatur pada pemenuhan kursi anggota dewan dan tidak hanya diatur pada pencalegkan saja, dengan itu perempuan diharapkan dapat bersaing dengan laki-laki dan kuota 30% keterwakilan perempuan akan

terpenuhi sesuai bunyi dalam Undang-Undang. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Sebenarnya strategi kita kalau dari cara kita itu. Itu sudah yang tepat menurut kita. Tapi dilapangan kita tidak tau seperti apa. Dan terutama di dapil kita yaitu dapil 6 kalau dapil 6 itu kabupaten dompu, kabupaten bima, dan kota bima, ada tiga wilayah. Sebenarnya kita sudah menguatkan strategi itu sedemikian rupa, hingga rencana kemenangan itu akan diraih. Yang kedua dari pengalaman sebelumnya kemudian dari hasil survey, kemudian dari teman-teman itu prediksi tidak ada yang mengatakan kita akan kalah, jadi semua yang terjadi diakhir itu diluar prediksi semua orang, bahkan orang yang tidak terlibat seperti kita yang caleg, yang tidak terlibat saja memprediksikan bahwa saya akan masuk, dan ada teman itu diprediksi tidak akan lolos malah dia yang lolos terus kita yang tidak lolos. Jadi itulah strategi itu tidak akan mesti, apa yang tidak mesti itu yang membuat kita menang. Kemudian disamping itu kita perempuan, perempuan itu ruang geraknya kan terbatas bukan undang-undang yang membatasi tapi kan didalam agama kita, kita menganut agama islam, jadi kita berbarur dengan laki-laki kan dibatasi sementara laki-laki itu sejak mereka lahir sudah diperkenalkan dengan alam yang luas, dengan dunia luas itu juga yang membuat kita tidak menang. Kemudian dari segi keberanian perempuan kan, bukan tidak berani kalau di adu dengan laki-laki tetap kebariannya dibawah standar karena perempuan lebih mengandalkan perasaan. Dan dari segi materi juga, tapi mungkin semua oranglah baik laki maupun perempuan, jadi kekalahan dari kendala segi materi itu baik laki maupun perempuan sama, siapa yang kaya dia dapat. Contoh kita yang di dapil 6 yang dipartai saya, yang di partai saya yang dapat suara terbanyak sekarang kan H. Mail yang mantan Wali Kota Bima. Jadi sebelum kita lahir orang ini sudah kaya dari dulu, jadi kita yang rakyat biasa harus melawan mereka ya berat, tapi itu tadi karena kita modal keberanian untuk beradu dengan laki, kalau dapet ya Alhamdulillah dan kemudian yang kemarin ada pergeseran dikit. Jadi sebenarnya kita dengan caleg-caleg yang kemarin membagi sembako misalkan karena saya dapat dari aspirasi kan, jadi aspirasi saya yang saya bagikan. Itu ketika yang kata orang serangan fajar itu ketika hari H itu, mereka sudah jalan dengan uangnya. Jadi pemilih kita yang sebelumnya yang menyatakan pastilah kalau ibu tidak ada yang begini sebelumnya, anggota DPRD yang pernah seperti itu tidak ada yang seperti itu. Sebenarnya bukan percaya atau gimana ya, tapi orang yang ngomong ini adalah orang yang pernah kita bantu juga, tapi buktinya setelah malam hari H itu semua berubah. Sehingga seharusnya Undang-Undang yang mengatur kuota 30%

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.



keterwakilan perempuan tidak hanya diatur pada pemenuhan Caleg saja karena ketika perhitungan suara pembagian kursi di DPRD tidak begitu, andaikan misalnya kuota 30% keterwakilan perempuan diatur pada pencalegkan dan sampai pada pemenuhan kursi anggota dewan mungkin perempuan akan diadu dengan perempuan dalam penghitungan suara dan tidak dirangkin bersama dengan laki-laki. Sehingga dengan begitu saya rasa kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD akan terpenuhi”.

Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Nurlaela yang menilai bahwa masih banyak orang yang terjebak stigma perempuan hanya pandai mengurus masalah rumah tangga atau ranah prihatin, dan tidak mampu bersaing dalam dunia politik atau ranah publik. Selain itu faktor minimnya dukungan keluarga dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan caleg perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hj. Nurlaela.<sup>20</sup>

“Strategi saya saat dilapangan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kami wanita berjuang untuk menang namun pandangan masyarakat masih saja sering menganggap perempuan remeh atau sebelah mata, sehingga saya ingin membuktikan persepsi bahwa perempuan mampu untuk bersaing di dunia politik dan bukan sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Sebenarnya tidak ada hambatan dari strategi itu, tapi saya kan tinggal di Mataram. Dan dapil saya NTB 6, jadi saya tidak terlalu dikenal gitu. Karena gini, kami wanita itu berjuang seperti saya, Umi Tien dan Hj. Misfalah kalau berjuang itu memang seperti laki-laki yang kalau laki-laki lari pudar ya kami lari pudar. Kita ini orang gila karena kenapa?, kami perempuan, kami harus menang, tapi kan pandangan orang-orang masyarakat apa sih bisanya perempuan itu. Tapi kami saya pribadi buktikan ini program saya. Sehingga kebanyakan dari pasangan caleg perempuan karena kurangnya dukungan dari keluarga itu. Namun itu tidak mengubah semangat para perempuan yang akan berjuang di DPRD Provinsi ataupun kabupaten pada pemilihan berikutnya, saya akan berjuang lagi dan saya akan mendukung para perempuan siapa saja yang ikut andil dalam pemilihan nantinya.”

Hal berbeda justru dilontarkan oleh Hj. Suryahartin yang berpendapat bahwa pemilih perempuan di NTB sebagai pemilih mayoritas belum kompak, terpilihnya wanita baginya bisa membawa aspirasi yang selama ini hanya

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hj. Nurlaela, Caleg *incumbent* PKB, Rabu 06 April 2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.



didominasi oleh laki-laki. Perempuan sudah seharusnya diberikan pendidikan politik supaya tidak hanya menjadi pelengkap dalam pesta demokrasi. Cukup mengejutkan bahwa perolehan suara Hj. Suryahartin lebih besar daripada pemilu 2014, tetapi kehadiran tokoh politik dari organisasi besar sebagai pesaing menggugurkan perolehan suara yang lebih baik dari periode sebelumnya tidak dapat mengantarkannya menuju anggota DPRD Provinsi NTB 2019-2024. mencoblos. ini sesuai dengan hasil wawancara:

“Kalau berbicara tantangan sebenarnya dari eksternal itu tidak ada, saya maju periode kedua suara meningkat, dulu saya naik DPRD periode pertama 10 ribu kurang tapi kalau kemarin hampir 12 ribu, tetapi apa yang membuat saya kalah, tapi sebenarnya bukan kalah tapi tersenggol, ada pesaing yang masuk sebenarnya masuk tidaknya dia, tetap salah kita untuk mendapatkan kursi, tapi itulah namanya politik. Detik-detik deadline dia masuk di partai kita dari organisasi besar otomatis dia lebih tinggi suaranya daripada kita, karena soalnya dari sisi konstituen, sisi pergerakan, ikatan emosional di masyarakat itu tidak ada masalah. Kalau strategi saya melakukan pendekatan dengan masyarakat, saya naik dulu di periode pertama boleh dibilang, saya tidak pernah beli suara, yang kalau orang bilang bahwa dengan uang akan naik. Saya murni hanya pendekatan kepada masyarakat, kalau bantuan komunal secara umum bantuan kebutuhan, pendampingan, pembimbingan iya. Tetapi kalau real dengan nyata-nyata dengan uang saya tidak. Dan kalau berbicara hambatan pasti ada dalam strategi itu, namanya juga masyarakat susah-susah gampang. Apalagi dengan eskalasi politik yang sekarang saking masyarakatnya sering memilih, apa sih yang tidak dipilih? Kadus dipilih, pekasih dipilih, jangan kata bupati, gubernur, wali kota juga dipilih. Saking seringnya mereka memilih akhirnya minset mereka berubah, kalau dulu mungkin mereka ingin dalam hal DPR minsalnya, kalau dulu mungkin awal-awalnya betul-belul yang bisa mengayomi mereka, memperjuangkan mereka, karena itu yang sesungguhnya. Lama-lama saking seringnya dan banyaknya godaan dari seringnya pentas politik ini jadi menawarkan dia juga, jadi ngapain kamu milih itu mending ini, jadi akhirnya menjadi pesta demokrasi. Artinya sekali setahun dapat bayaran dari suaranya itu karena cepat tergiur oleh materi, sehingga kepercayaan pemilih yang awalnya akan dipilih berubah jika diberikan materi dll. Sehingga akan jauh dari target yang kita dapat kalau satu lokasi walaupun dia sudah setia dengan kita, disitu kita targetkan dengan seratus suara kita dapat, empat puluh atau tiga puluh

sudah syukur, karena masyarakat juga punya kebutuhan jadi semakin sulit untuk dipegang, jadi mereka seperti *take in give*".<sup>21</sup>

Dari pemaparan tiga narasumber ditemukan persamaan, subordinasi perempuan di ranah politik masih kentara jelas, perempuan dianggap tidak memiliki kompetensi dalam berpolitik dibanding laki-laki. Jelas politik bersifat maskulin nampak di sini, namun sebelum melangkah lebih lanjut akan dipaparkan hasil analisis dengan menggunakan teori modal sosial dalam bab berikutnya.

#### **D. Diskusi**

Dalam bab ini temuan data berdasarkan wawancara terhadap caleg *incumbent* perempuan yang gagal dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB 2019-2024 dianalisa menggunakan teori modal sosial dengan kerangka teori kepercayaan, norma dan jaringan.

#### **Pergeseran Kepercayaan Masyarakat Terhadap Caleg *Incumbent* Perempuan**

Menjadi sebuah tanda tanya besar, mengapa seorang *incumbent* tidak kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTB di periode berikutnya. Namun, hal ini dianggap wajar sebab pergeseran makna politik yang begitu cepat dari politik balas budi menuju politik transaksional. Indonesia termasuk tiga besar dunia perihal praktik politik uang atau jual beli suara,<sup>22</sup> sungguh data yang memprihatinkan sekaligus ironi bagi perkembangan demokrasi pasca reformasi. Politik berciri pragmatis dan transaksional kian dilematik dalam demokrasi yang menekankan pemilihan dimana pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi dan hak eksklusif bagi partai politik sebagai peserta pemilu. Politik Uang tidak hanya sebatas hubungan yang terjalin antara calon legislatif dan pemilih, namun juga antara calon legislatif dan partai politik, praktik politik uang yang sering dilakukan adalah *vote buying* pada tahap kampanye

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Caleg *incumbent* partai NasDem, Selasa 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

<sup>22</sup> Ibadurrahman, "Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah," Lex Renaissance, No. 4 Vol. 6 (Oktober-2021) 771.

dan pemungutan suara sampai dengan penyelewengan dana publik dalam bentuk program maupun dana pribadi dalam bentuk patronase di luar masa pemilu.<sup>23</sup> Kondisi geografis Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor mengapa politik berbiaya sangat tinggi, diperparah dengan tidak meratanya pembangunan daerah di Indonesia sehingga akses informasi belum tersampaikan secara menyeluruh, faktor-faktor ini yang bisa memengaruhi perilaku pemilih.<sup>24</sup>

Posisi caleg *incumbent* belum tentu menjamin kemudahan untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, bisa disebut kepercayaan masyarakat terhadap mereka merosot dibandingkan dengan periode pemilu 2014. Indikatornya jelas, suara yang mereka dapat tidak bisa mengungguli lawan caleg lainnya. Hal berbeda justru dialami oleh Hj. Suryahartin caleg Partai Nasdem, justru perolehan suaranya pada pemilu 2019 hampir menyentuh angka 12 ribu dibandingkan dengan pemilu 2014, bisa diartikan Hj. Suryahartin semakin dipercaya oleh pemilihnya, meskipun secara kuantitas suara masih kalah dengan caleg lain yang akhirnya berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi NTB 2019-2024.<sup>25</sup> Pada lain kesempatan beliau menyinggung tidak adanya kekompakan pada pemilih perempuan di NTB yang notabennya pemilih mayoritas, bisa disimpulkan pemilih perempuan belum sepenuhnya mempercayai caleg dari kaumnya sendiri guna mewakili aspirasi perempuan dalam ranah legislasi.

Berbeda dengan Hj. Suryahartin, Hj. Misfalah caleg Partai Demokrat justru optimis lolos sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, meski kenyataannya tidak demikian, pemilihnya dianggap tidak lagi mempercayai dirinya untuk menduduki kursi anggota DPRD Provinsi NTB setelah apa yang telah diberikan

---

<sup>23</sup> Sunaji Zamroni, dkk, Partai Politik, Uang dan Pemilu, Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2016, ed:Mada Sukmajati, 114-115.

<sup>24</sup> Ratnia Sholihah, "Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1 (Juni-2016), 105.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Caleg *incumbent* partai NasDem, Selasa 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

pada masa jabatannya pada periode menjabat 2014-2019.<sup>26</sup> Sedangkan Hj. Nurlaela caleg PKB mengklaim kurangnya kepercayaan pemilih kepadanya disebabkan faktor domisili di Mataram yang menjadi hambatan dalam membangun hubungan emosional pemilih di dapil yang diwakili.<sup>27</sup> Klaim kompak mereka bertiga lontarkan, pemilih perempuan dianggap belum bisa mempercayai kaumnya sendiri untuk mewakili aspirasi, justru sebaliknya pemilih perempuan lebih mempercayai caleg laki-laki untuk mewakili aspirasi mereka di tingkat legislasi.

Terlepas dari faktor-faktor tersebut, tidak bisa dipungkiri dengan hanya H. Baiq Isvie Rupaeda saja yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi NTB 2019-2024 tentu membuktikan bahwa pemilih kurang percaya terhadap kemampuan caleg perempuan, pendidikan politik menjadi PR bersama guna mewujudkan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan demi rakyat. Sehingga diharapkan SDM Perempuan dan Laki-Laki bisa saling menopang dan bersaing dengan sehat dalam pesta demokrasi negeri ini.

### Subordinasi Caleg Perempuan

Perempuan berpolitik dianggap sebagian orang menyalahi kodrat keperempuannya, dimana perempuan seharusnya konsen urusan domestik yaitu rumah tangga, kemunculan perempuan dalam ranah publik (politik) dianggap kurang tepat dan kurang etis menurut doktrin agama.<sup>28</sup> Budaya patriarki yang sebagian masih berlaku di beberapa daerah Indonesia semakin memperburuk peluang perempuan berkontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat lokal. Menarik untuk menganalisa lebih jauh faktor norma apa saja yang menggagalkan caleg *incumbent* perempuan untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi NTB.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Hj. Nurlaela, Caleg *incumbent* PKB, Rabu 06 April 2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.

<sup>28</sup> Sri Warjiati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, " AL Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6 No.1 (April-2016), 25-26.



Ketiga narasumber sepakat bahwa lawan terberat mereka adalah stigma masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai pelengkap penderita saja, tidak ada dukungan keluarga, juga tidak ada perhatian terhadap kualitas caleg perempuan melalui pendidikan politik yang benar-benar serius. Hj. Suryahartin lebih menyoroti kualitas caleg perempuan sebagai wujud keseriusan partai politik, beliau tidak menganggap masyarakat meragukan kapasitas politisi perempuan atau perempuan berpolitik dicap tidak etis, justru sistem perekrutan dan pengkaderan dari partai politik harus diperbaiki serta dievaluasi guna menghasilkan caleg yang berkualitas, namun tidak sekedar dari aspek partai politik saja, namun dari caleg perempuan harus sadar diri supaya tidak menjadi unsur pelengkap kuota 30% perempuan.<sup>29</sup>

Strategi caleg menjadi salah satu faktor realistis menuju kursi anggota DPRD Provinsi NTB, terlepas caleg tersebut laki-laki atau perempuan, meskipun masyarakat hanya memandang remeh dan sebelah mata namun seharusnya tidak menjadi halangan perjuangan perempuan dalam memperebutkan kursi legislasi.<sup>30</sup> Norma-norma agama, dalam hal ini agama Islam dianggap oleh Hj. Misfalah membatasi ruang gerak perempuan, ketidakadilan muncul disebabkan sejak dilahirkan laki-laki dikenalkan ke dunia luas berbanding dengan perempuan yang sejak lahir hanya diperkenalkan dengan seisi rumah,<sup>31</sup> klaim ini diperparah dengan mayoritas politisi adalah laki-laki sehingga perempuan hanyalah pelengkap dalam sistem politik.

Dari temuan data di lapangan hanya ada satu informan yang masih mempermasalahkan norma agama sebagai penghambat perempuan berpolitik, satu informan mempermasalahkan sistem perekrutan caleg perempuan sedangkan satu lagi lebih menekankan aspek strategi dan pembuktian peran

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Caleg *incumbent* partai NasDem, Selasa 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Hj. Nurlaela, Caleg *incumbent* PKB, Rabu 06 April 2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, Kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.

perempuan dalam berpolitik kepada masyarakat yang masih memandang remeh dan sebelah mata.

### Jaringan Politik

Kemampuan membangun jejaring menjadi syarat mutlak bagi politisi, proses lobi dan kemahiran komunikasi dapat memperkuat jaringan kepentingan yang saling menguatkan. Kekalahan yang dialami oleh Hj. Suryahartin seakan mengamini opini di atas, lawan yang baru masuk ke partai NasDem atau partai yang sama dengannya menjelang *deadline* pendaftaran ditambah latar belakang dari organisasi besar otomatis memiliki keunggulan dari aspek perolehan suara,<sup>32</sup> terbukti Hj. Suryahartin tumbang meskipun perolehan suaranya di tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2014. Organisasi besar seakan menjadi kendaraan politik yang biasa dipergunakan sebagai modal berpolitik di negeri ini, hal ini sangat wajar mengingat kedekatan emosional antara organisasi dengan anggotanya, ditambah menjadi pengurus penting dalam organisasi semakin mempertebal asa dikenal oleh anggota organisasi tersebut.

Keterbatasan akses sosial dan politik dinggap sebagai penghambat membangun jaringan politik, hal ini tidak bisa lepas dari doktrin peran perempuan dalam agama. Berbeda dengan caleg laki-laki yang menghalalkan segala cara untuk menang, Hj. Misfalah menganggap keterbatasan gerak perempuanlah justru yang membuat para caleg perempuan terbiasa tidak biasa menggunakan segala cara untuk menang. Guna membangun jaringan juga dibutuhkan logistik yang cukup besar, sayangnya beliau menganggap logistik yang dimiliki masih kalah dari ketersediaan logistik laki-laki sebagai lawan dari dapilnya.<sup>33</sup> Berbeda dengan Hj. Nurlaela yang tidak spesifik berbicara masalah kendala jaringan, baginya kekalahan kemarin murni strategi

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Caleg *incumbent* partai NasDem, Selasa 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, Kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.



yang digunakan dirasa kurang efektif.<sup>34</sup> Dari ketiga informan hanya satu orang yang kalah ketika berhadapan dengan jaringan masa organisasi besar, sedangkan kedua informan yang lain disebabkan faktor keterbatasan perempuan dan kesalahan strategi pemenangan.

### E. Simpulan

Sebagai caleg *incumbent* seharusnya memiliki keunggulan dalam hal teknis, pemahaman medan dapil dan pemetaan isu, faktanya tiga orang caleg perempuan *incumbent* DPRD Provinsi NTB tidak dapat menggunakan keunggulannya. Dilihat dari teori modal sosial terdapat 3 faktor kegagalan caleg *incumbent* perempuan DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2019 yaitu faktor Kepercayaan, Norma dan Jaringan. Pertama, caleg perempuan *incumbent* tidak dapat menarik kepercayaan pemilih, khususnya pemilih perempuan sebagai pemilih mayoritas NTB untuk memilihnya, meskipun ada satu caleg *incumbent* perempuan yang berhasil mendapatkan suara lebih besar dari perolehan suara pemilu sebelumnya, namun perolehan suara ini belum bisa mengantarkannya menuju anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024. Kedua, caleg *incumbent* perempuan masih terbelenggu oleh norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama maupun norma sosial. Sistem perekrutan caleg perempuan menjadi sorotan guna memperbaiki kualitas caleg perempuan karena selama ini caleg perempuan hanya sebagai formalitas pelengkap administrasi kontestasi, dan stigma masyarakat yang masih memandang remeh serta sebelah mata caleg perempuan. Ketiga, kegagalan caleg *incumbent* perempuan dalam membangun jaringan politik disebabkan oleh caleg lain yang memiliki latar belakang organisasi besar, aspek materi atau logistik kampanye yang lebih kecil daripada kompetitor, keterbatasan ruang gerak perempuan dalam membangun jejaring politik dan terakhir kesalahan dalam menggunakan strategi pemenangan.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hj.Nurlaela, Caleg *incumbent* PKB, Rabu 06 April 2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05



## RERFERENCES

### Buku

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2014). *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Fakih, Mansour. (2013) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanum, Farida.(2018). *Kajian dan Dinamika Gender*, Malang: Intrans Publishing.
- Noor, Juliansyah. (2013) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat. (2011) *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Zamroni, Sunaji, dkk. editor:Mada Sukmajati (2016) *Partai Politik, Uang dan Pemilu*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.

### Jurnal

- Aprilia, L Bella, Florencia Maria Surya, Mentari Svarna Pertiwi. (2020) "Analisis Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminis dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan Covid- 19 di Jerman, Selandia Baru dan Taiwan," *Jurnal Unpar, Volume 2*,92-93.
- Ibadurrahman. (2021), "Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah," *Lex Renaisan, No. 4 Vol. 6*, 771.
- Kiftiyah, Anifatul. (2019). " Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia", *Jurnal Yuridis, Volume 6, No. 2*. 57.
- Manek, Emiliana. (2015) "Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik Praktis Perempuan Belu di Kabupaten Belu", *Program pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Vol. 20, No. 2*, 118-120.



- Sholihah, Ratnia. (2016) "Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Impilkasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 No. 1, 105.
- Syahra, Rusydi. (2003) "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1, 4-6.
- Wahyudi, Very (2018), "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No. 1, 81.
- Warjiati, Sri. (2016). "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, " *AL Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6 No.1, 25-26.
- Winengan. (2018), "Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, 63-65.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, minggu 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
- Wawancara dengan Hj.Nurlaela, Caleg incumbent PKB, Rabu 06 April 2022, Melalui Video Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
- Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Caleg incumbent partai NasDem, Selasa 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

#### **Website**

- <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024.html>
- <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/.html>



<https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>

